

Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta

by Eva Nurlaily Rohmah

Submission date: 15-Jan-2023 09:29PM (UTC-0700)

Submission ID: 1993379360

File name: document_2.pdf (552.64K)

Word count: 4882

Character count: 31319

Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta

Eva Nur Laily Rohmah¹ dan Zuli Kasmawanto²

¹ Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
e-mail: evanurlaily@unisda.ac.id, zulikasmawanto@unisda.ac.id

Received: 04 Januari 2022; Revised: 30 Januari 2022; Accepted: 15 Februari 2022; Published: Februari 2022; Available online: Februari 2022

Abstract

Smart Indonesia Card-College Program is one of the government's policy efforts in improving the quality of human resources while preparing the nation's next generation to excel. Darul 'Ulum Lamongan Islamic University is one of the private universities that implements the KIP-Lecture Program in the 2020/2021 academic year. This article attempts to examine and analyze the implementation process of the KIP-Kuliah Program in Private Higher Education with a case study at the Islamic University of Darul 'Ulum Lamongan. The results showed that there were few obstacles in the communication process and student resources who did not comply with the rules, especially in collecting files so that it had an impact on the process of developing funds. The author provides suggestions for stakeholders, namely to facilitate student recipients of the KIP-Kuliah program with empowering trainings. Suggestions for the government to increase the quota because of public interest in obtaining KIP-Kuliah.

Keyword: Implementaion, Public Policy, KIP-Kuliah.

Pendahuluan

Isu kemiskinan masih menjadi perhatian utama oleh pemerintah Indonesia. Pada Maret 2021 BPS merilis laporan bahwa sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan pada Maret 2021 sedikit menunjukkan penurunan dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. (Statistik, 2021) Meskipun secara tren jumlah kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan tapi faktanya masih sering kita temui masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai kebijakan telah diluncurkan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, namun dampak yang dirasakan belum signifikan. Rendahnya akses Pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia.

Salah satu faktor rendahnya tingkat Pendidikan di Indonesia karena kurangnya pemerataan akses pada jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada Angka Partisipasi Kasar (APK) di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan angka 30.85. APK Perguruan Tinggi Jawa Timur berada di angka 29.52 terpaut jauh dari Aceh. APK

Aceh berada pada angka 43.58 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Tabel. 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi		
	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)
ACEH	43.86	44.51	44.58
SUMATERA UTARA	31.11	30.82	31.14
SUMATERA BARAT	44.19	42.18	43.09
RIAU	34.15	33.93	35.07
JAMBI	33.78	30.71	31.42
SUMATERA SELATAN	26.23	25.59	26.41
BENGKULU	38.31	37.63	38.39
LAMPUNG	21.32	21.98	23.08
KEP. BANGKA BELITUNG	13.20	14.27	14.73
KEP. RIAU	27.64	25.11	26.6

			8
DKI JAKARTA	36.71	39.43	40.3
			4
JAWA BARAT	25.14	25.15	25.7
			5
JAWA TENGAH	21.96	21.80	22.6
			2
DI YOGYAKARTA	70.60	73.14	74.6
			9
JAWA TIMUR	29.99	29.20	29.5
			2
BANTEN	33.40	33.22	33.0
			7
BALI	36.40	35.96	36.4
			6
NUSA TENGGARA BARAT	29.75	30.70	31.2
			8
NUSA TENGGARA TIMUR	30.14	30.22	31.2
			8
KALIMANTAN BARAT	22.68	24.87	25.3
			6
KALIMANTAN TENGAH	25.24	25.45	25.7
			0
KALIMANTAN SELATAN	26.41	27.04	27.3
			5
KALIMANTAN TIMUR	35.64	37.78	39.1
			6
KALIMANTAN UTARA	21.58	23.43	22.7
			1

SULAWESI UTARA	35.00	33.86	34.6
			1
SULAWESI TENGAH	40.61	38.64	39.3
			2
SULAWESI SELATAN	41.23	42.72	42.6
			9
SULAWESI TENGGARA	46.42	47.56	47.4
			0
GORONTALO	35.23	36.71	37.7
			4
SULAWESI BARAT	28.90	30.85	29.4
			4
MALUKU	48.42	47.65	48.6
			2
MALUKU UTARA	42.68	44.02	43.9
			7
PAPUA BARAT	35.97	34.83	35.3
			0
PAPUA	19.03	21.08	21.8
			7
INDONESIA	30.19	30.28	30.8
			5

Sumber: BPS, 2019

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31(1) bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara, oleh karena itu negara memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan pendidikan bagi warganya. Berdasarkan UU No 2 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban

dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar anak bangsa di Perguruan Tinggi guna menyiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, Pemerintah selalu berupaya untuk dapat menjamin anak Indonesia yang tidak mampu dalam segi ekonomi dan memilik prestasi untuk dapat menempuh pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Budaya meluncurkan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). (Pendidikan et al., 2020)

Sebelum diluncurkannya Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), pemerintah melalui Kemenristekdikti telah meluncurkan Program Beasiswa Bidikmisi. Sejak tahun 2010, Beasiswa Bidikmisi telah membantu lulusan SMA/ SMK yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Mulai tahun 2020, skema pembiayaan pendidikan ini mengalami pergeseran. Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar mulai tahun ajaran 2020/2021. Program ini berawal dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) yakni bantuan pendidikan yang

diberikan untuk siswa SD, SMP hingga SMA.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan bentuk upaya keseriusan Pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia dengan memudahkan akses pendidikan tinggi bagi anak Indonesia kurang mampu. Namun bercermin pada implementasi Program Beasiswa Bidikmisi masih ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa. Penelitian yang dilakukan Muharani Lestari, dkk (2019), penelitian tersebut menunjukkan adanya penerima beasiswa di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Riau yang tidak layak sebagai penerima beasiswa karena dinilai mereka berasal dari kalangan keluarga menengah ke atas.

Berbeda dengan pelaksanaan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), penelitian yang dilakukan Fauzi dkk (2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) berjalan sesuai dengan ketentuan dari Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, namun dalam implementasinya ditemukan faktor penghambat proses pengelolaan.

Kurangnya koordinasi antara antara pengelola dengan pihak-pihak terkait dan kurangnya informasi dan komunikasi yang disampaikan kepada penerima Beasiswa Bidikmisi menjadi faktor penghambat pada proses implemntasi di Universitas tersebut.(Fauzi & Samsuruhuda, 2019)

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan (UNISDA) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur yang bernaungan di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi VII (LLDIKTI VII), sebelumnya Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan juga telah menyelenggarakan Program Beasiswa Bidikmisi yang dimulai pada tahun 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 2 orang. Mulai tahun ajaran 2020/2021 Program Bidikmisi digantikan oleh Program Kartu Indonesia Kuliah (KIP-Kuliah), dengan jumlah peserta di Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan sejumlah 302 orang, adapun perincian jumlah mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di Universitas Islam Darul ‘Ulum sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi

No	Tahun	Jumlah
1	2016	2 Mahasiswa

2	2017	3 Mahasiswa
3	2018	96 Mahasiswa
4	2019	132 Mahasiswa

Sumber: hasil wawancara, 2021

1. Landasan Teori

Kebijakan publik tidak hanya didefinisikan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, namun juga mencakup arah tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Thomas Dye (1992) mengartikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. (Suaib, 2016) Di sisi lain James E. Anderson (1970) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Suatu kebijakan dapat dirasakan manfaatnya melalui tahapan-tahapan penting kebijakan publik (Anderson). Tahapan pertama adalah agenda setting. Tahapan ke dua adalah formulasi kebijakan. Tahapan ke tiga merupakan adopsi. Tahapan ke empat adalah implementasi dan tahapan ke lima adalah evaluasi kebijakan.(Suaib, 2016)

Secara umum kebijakan publik di Indonesia memiliki tujuan luhur untuk kesejahteraan masyarakat. Namun seringkali yang menjadi permasalahan

adalah pada tahap implementasinya.³ Menurut Van Meter Van Horn tahapan implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok pemerintah/pejabat/swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah menjadi keputusan kebijakan (Van Meter Van Horn)¹⁷. Di sisi lain Edwards mengartikan implementasi sebagai tahapan dalam proses suatu kebijakan, yang berada di antara proses penyusunan dan hasil atau dampak dari kebijakan yang berjalan.

Edward mengungkapkan bahwa ada empat factor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan. Empat factor tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga dapat menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan.²⁴ Empat factor tersebut meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi diperlukan dengan tujuan para pembuat keputusan dan para pelaksana kebijakan konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan.²⁵ Sumberdaya berkaitan dengan kompetensi staf pelaksana, informasi terkait cara pelaksanaan kebijakan dan kewenangan yang dibutuhkan oleh implementator.

Disposisi terkait komitmen implementator dalam melaksanakan kebijakan. Terakhir, struktur birokrasi terkait mekanisme kerja yang dibuat dalam pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dilakukan oleh perguruan tinggi dengan mengacu panduan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kemendikbudristek. Hal ini lah yang akan memunculkan perbedaan terkait mekanisme pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) di masing-masing perguruan tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Karena masing-masing perguruan tinggi memiliki sumberdaya dan manajemen yang berbeda demikian pula Perguruan Tinggi Swasta di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.

2. Metode Penelitian⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Creswell (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.(Raco, 2018) Penelitian ini berlokasi di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan. Universitas Islam Darul

'Ulum merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang terletak di Kabupaten Lamongan dan bernaungan di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi VII (LLDIKTI VII) Sumber informasi dari penelitian terdiri dari sumber primer maupun sekunder. Beberapa informan yang dijadikan sumber informasi terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Alumni, Kepala Bagian Kemahasiswaan, Ketua dosen mahasiswa penerima KIP Kuliah dan perwakilan mahasiswa penerima KIP Kuliah di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan. Selain itu juga didukung oleh studi literatur dan dokumen-dokumen pendukung terkait pelaksanaan Program KIP Kuliah di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kebijakan dengan spesifik kajian pada implementasi kebijakan. Kajian ini akan membantu penulis untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.

Hasil dan Pembahasan

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)

Dasar hukum pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2020 adalah Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Melalui Program Indonesia Pintar, pada tahun 2020 pemerintah memberikan bantuan Pendidikan kepada calon mahasiswa termasuk penyandang disabilitas yang diterima di perguruan tinggi yang berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) memberikan bantuan pendidikan berupa pembebasan biaya perkuliahan dan bantuan biaya bulanan. Kebijakan ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses Pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Adapun tujuan Program Indonesia Pintar bagi Pendidikan tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020) adalah:

- a. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.
- b. Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik.

- c. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau;
- d. Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan tinggi.

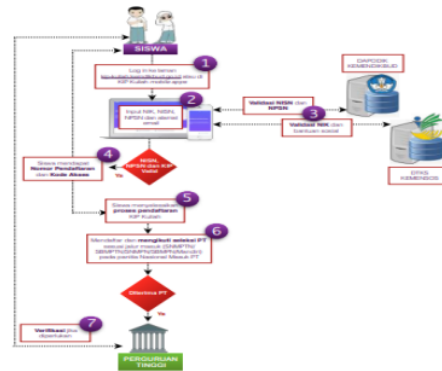
Pada tahun 2020 pemerintah mulai memperluas penerima beasiswa masuk perguruan tinggi melalui Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) termasuk bagi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi *on going* hingga mereka menyelesaikan masa studinya. Adapun persyaratan mendaftarkan diri sebagai penerima KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

- a. Siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
- b. Memiliki potensi akademik baik namun mempunyai keterbatasan ekonomi dengan melampirkan bukti dokumen yang sah.
- c. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta pada

Program Studi akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Program Studi dengan akreditasi C.

Adapun alur pendaftaran KIP Kuliah sebagai berikut:

ALUR PENDAFTARAN KIP KULIAH



Gambar 2. Alur Pendaftaran KIP Kuliah

Sumber: Pedoman KIP 2020

1. Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile apps yang dapat diunduh melalui Play Store.
2. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang aktif;
3. Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK,

NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah;

4. Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan;
5. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti (SNMPTN/SBMPTN/SNMPN/SBMPN/Mandi ri);
6. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilih;
7. Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Perguruan Tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Adapun keunggulan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah sebagai berikut:

1. Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi (Ujian Tulis Berbasis Komputer/UTBK serta seleksi lain)

yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos);

2. Pembebasan biaya kuliah/pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi;
3. Bantuan biaya hidup.

Pemerintah juga memiliki Program Teman KIP untuk membantu dan mendampingi proses penerimaan manfaat KIP-Kuliah. Program Teman KIP memiliki lima prinsip dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Sebuah kerja sosial yang bersifat kerelevanan untuk memastikan ketepatan sasaran manfaat KIP-kuliah.
2. Memastikan kemudahan dan keterbukaan akses informasi terkait KIP-Kuliah.
3. Mendelegasikan coordinator pada Perguruan Tinggi dari unsur mahasiswa guna membantu dalam memberikan informasi.
4. Bersinergi dengan rektorat Perguruan Tinggi penyelenggara KIP-Kuliah.

5. Mengawal pemerataan akses Pendidikan yang dapat dijangkau oleh warga di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat diterima bagi mereka yang membutuhkan.

3.3. Struktur Pengelola Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)

Struktur pengelola program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) melibatkan sejumlah sumber daya manusia diantaranya Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, dan Kepala Bagian yang termasuk dalam bagian Pengelola Program KIP. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengelola Program KIP-Kuliah melibatkan banyak pihak.

Tabel 3. Struktur Pengelola Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah)

No	Tugas	Unsur Pengelola	Keadaan	
			Berfungsi	Tidak Berfungsi
1	Bertanggung Jawab	Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan & Alumni	√	
2	Pengelola	Biro	√	

a	Administrasi Akademik & Kemahasiswaan	
3	Bagian Kemahasiswaan	√

Sumber: Hasil Wawancara

Permasalahan Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.

Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dimulai pada tahun 2020. Sebelumnya, Pemerintah memberikan bantuan biaya Pendidikan kepada masyarakat kurang mampu melalui program beasiswa bidikmisi. Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan mulai menerima bantuan program beasiswa bidikmisi pada tahun 2016. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) penulis menggunakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Edwards III yang sebagai berikut:

Komunikasi

Penyampaian informasi di awal pelaksanaan terkait Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak universitas kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan menunjukkan bahwa pihak universitas telah menyampaikan informasi terkait Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) kepada masyarakat secara optimal. Pihak universitas telah melakukan sosialisasi melalui media-media yang dimiliki Universitas seperti website, media sosial.



Gambar 1. Contoh Gambar Sosialisasi di Media Sosial

Sumber: Instagram @unisda_official

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui informasi terkait program tersebut, sehingga pihak universitas masih mencantumkan nama Bidikmisi dalam sosialisasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat akan program bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa. Sebagian masyarakat yang berada di daerah terpencil masih belum mengetahui perubahan program Bidikmisi ke Kartu Indonesia Pintar (Kuliah).

Terkait jaringan komunikasi antara penyelenggara Universitas dengan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) selama proses pelaksanaan telah dilakukan dengan baik. Namun dengan banyaknya jumlah mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) tidak semua mahasiswa memiliki rasa patuh terhadap aturan yang telah disampaikan. Komunikasi masih dijadikan alasan mahasiswa yang mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan beberapa laporan yang diminta oleh penyelenggara Universitas. Hal ini akan berdampak pada

keterlambatan pencairan dana yang akan diajukan oleh pihak penyelenggara Universitas ke LLDIKTI.

Sumberdaya

Kapasitas sumberdaya dari Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan sudah cukup mumpuni dan kompeten dalam menyelenggarakan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Pihak Universitas memiliki tim khusus yang dipilih oleh pimpinan Rektorat dalam melakukan seleksi ataupun administrasi dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) untuk bekerjasama dengan Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.

Seleksi calon mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan yang bekerjasama dengan tim pilihan. Namun kendala terkait sumberdaya yang muncul pada pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) adalah dari mahasiswa itu sendiri. Masih banyak calon mahasiswa yang belum faham akan alur pendaftaran KIP Kuliah. Sebagian calon mahasiswa memahami bahwa mereka yang memegang Kartu Indonesia Pintar di bangku sekolah akan secara otomatis terdaftar di Progran

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Dampaknya mereka yang tidak melakukan konfirmasi ke pihak Universitas dan dengan pemahaman tersebut akhirnya mereka tidak melakukan pendaftaran secara online ke laman yang tersedia.

Proses seleksi calon mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah terdapat tahapan survey lokasi atau survey rumah calon penerima Program KIP-Kuliah. Dalam proses survey, tim surveyor menemukan beberapa calon mahasiswa yang layak menerima²⁹ tapi data calon mahasiswa tersebut tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan Tim dalam melakukan seleksi.

Struktur Birokrasi

Edwards III mengklasifikasikan indikator keberhasilan suatu kebijakan salah satunya adalah disposisi. Namun pada instrumen disposisi peneliti tidak menemukan permasalahan yang berarti. Namun pada penelitian lain menunjukkan bahwa yang sering dijumpai di lapangan adalah penentu baik tidaknya disposisi salah satunya adalah struktur birokrasi. (Roziqin & Yusuf, 2020). Oleh karena itu peneliti perlu menganalisis bagaimana struktur

birokrasi dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) pada Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.

Keadaan birokrasi dengan struktur hirarki yang bertingkat-tingkat tidak jarang akan menimbulkan permasalahan bagi penyelenggara. Pelaporan dilakukan dari tingkat Universitas hingga ke tingkat Kementerian sehingga berdampak pada proses pencairan. Pada proses ini lah kelengkapan berkas yang diminta oleh pihak Universitas dari mahasiswa menentukan cepat tidaknya proses berjalan. Oleh karena itu dalam indikator ini perlu dilihat bagaimana mekanisme pelaporan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) pada tingkat Universitas hingga pada tingkat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi VII (LLDIKTI VII) ditambah dengan kendala masih adanya mahasiswa yang kurang patuh dengan ketentuan waktu pengumpulan laporan ke pihak Universitas.

22
Upaya Pemecahan Masalah Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)

22
Masalah yang terjadi pada proses implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) telah diatasi dengan cepat oleh pihak Universitas.

Pihak Universitas mengambil beberapa langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Langkah-langkah yang diambil di antaranya:

a. Permasalahan Komunikasi

Permasalahan yang muncul karena masih kurangnya informasi tentang Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) di masyarakat, pihak universitas mengatasinya dengan menerapkan sistem jemput bola. Pihak universitas melalui Tim Penerimaan Mahasiswa Baru melakukan komunikasi langsung dengan pihak-pihak sekolah dan beberapa Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Lamongan, Gresik dan Bojonegoro. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak terkait dapat melanjutkan informasi tentang Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) kepada siswanya dan masyarakatnya. Dengan kata lain informasi disampaikan tidak hanya melalui media yang dimiliki universitas saja tetapi didukung dengan komunikasi verbal dengan masyarakat.

Tidak hanya dengan sistem jemput bola. Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Islam Darul 'Ulum juga membantu calon mahasiswa yang

mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran KIP-Kuliah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tapi tetap memiliki semangat untuk melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi.

b. Sumberdaya

Permasalahan pada sektor sumberdaya mahasiswa yang kurang patuh pada aturan-aturan yang ditentukan seperti pengumpulan deadline laporan, pihak universitas merespon permasalahan tersebut dengan menunjuk beberapa dosen untuk dijadikan pendamping mahasiswa penerima KIP-Kuliah. Pendamping KIP-Kuliah ini bertugas mengawasi dan memonitoring mahasiswa penerima KIP-Kuliah supaya dapat menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak ada lagi mahasiswa yang melakukan kesalahan seperti keterlambatan dalam mengumpulkan laporan karena hal ini dapat berdampak pada waktu pencairan dana bagi mahasiswa.

Pihak universitas juga menambah tenaga surveyor dalam pelaksanaan seleksi calon mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) karena pada setiap

tahunnya jumlah pendaftar Program Bantuan Pendidikan tersebut semakin meningkat. Hal ini dilakukan membantu mempercepat proses penetapan mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Namun cukup disayangkan dengan banyaknya jumlah pendaftar, tidak semua pendaftar dapat ditetapkan sebagai penerima hal ini dikarenakan terbatasnya kuota yang ada di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.

c. Struktur Birokrasi

Disposisi sangat dibutuhkan dalam karena apabila implementator memiliki karakteristik yang baik maka ia akan menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berbicara tentang struktur birokrasi maka akan bermuara pada pembahasan prosedur operasi atau mekanisme jalannya kegiatan atau pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, fenomena yang ada disposisi dari implementator banyak dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ada.

Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah memiliki beberapa daya dukung administrasi diantaranya adalah mekanisme seleksi peserta program, mekanisme pembinaan peserta program dan mekanisme

pelaporan pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah).

Seleksi peserta calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) meliputi diseminasi informasi program, persyaratan administrasi peserta, seleksi peserta dan penetapan calon penerima KIP-Kuliah.

Tabel 4. Instrumen Mekanisme Seleksi Calon Penerima Program KIP-Kuliah

No	Bentuk Administrasi	Keterangan Instrumen	Keadaan	
			Ada	Tidak ada
1	Diseminasi Informasi	Pengumuman penerimaan Program KIP-Kuliah dan jadwal pelaksanaan	√	
2	Persyaratan program	Formulir pendaftaran KIP-Kuliah	√	
3		Foto copy Kartu KIP	√	
4		Foto copy Kartu Keluarga	√	
5		Foto copy	√	

		Legalisir Ijazah/Surat at Keterangan lulus		
6		Surat Keterangan Tidak mampu	√	
7		Tes Potensi Akademik	√	
8	Penetapan Calon Penerima KIP-Kuliah	Rapat Penetapan peserta program KIP-Kuliah	√	
9		SK Penetapan Penerima Program KIP-Kuliah	√	
10		Pengumuman peserta yang diterima	√	

Sumber: catatan hasil wawancara, 2021

Mekanisme pembinaan mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah merupakan ketentuan yang berkaitan dengan kedisiplinan

mahasiswa meliputi tata tertib peserta penerima program KIP-Kuliah, proses penegakan tata tertib dan kegiatan mahasiswa.

Tabel 5. Instrumen Mekanisme
 Pembinaan Mahasiswa Penerima
 Program KIP-Kuliah

No	Keterangan Instrumen	Keadaan	
		Ada	Tidak ada
1	Tata tertib mahasiswa Universitas Darul 'Ulum	√	
2	Ketentuan Mahasiswa Universitas Darul 'Ulum	√	
3	Ketentuan target peserta KIP-Kuliah	√	
4	Sistem penghargaan dan hukuman	√	
5	Kegiatan korikuler mahasiswa penerima KIP- Kuliah	√	
6	Daftar kewajiban mahasiswa penerima KIP-Kuliah	√	

7	Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa penerima KIP-Kuliah	√
8	Kegiatan UKM	√
9	Penanggung Jawab	√

Sumber: hasil wawancara, 2021

Mekanisme pelaporan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) merupakan proses pertanggungjawaban pelaksanaan dan tugas program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Mekanisme pelaporan dilakukan secara administrative pada setiap semesternya dilakukan Perguruan Tinggi penyelenggara yang dimana disini adalah Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan kepada Pemerintah. Alur pelaporan berawal dari pelaporan yang dilakukan mahasiswa ke pihak Universitas, setelah terkumpul semua laporan kemudian pihak Universitas melaporkan ke pihak Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi VII (LLDIKTI VII) dengan melampirkan berkas-berkas yang ditentukan yang selanjutnya dilaporkan ke tingkat pusat. Adapun instrumen mekanisme pelaporan program di tingkat Universitas adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Instrumen Mekanisme
Pelaporan Program Kartu Indonesia
Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) Tingkat
Universitas

No	Instrumen Pelaporan	Keadaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Laporan perkembangan akademik	√	
2	Laporan rekening tabungan	√	
3	Laporan kegiatan mahasiswa	√	

Sumber: Hasil wawancara, 2021

Program ⁴ Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) telah menumbuhkan harapan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat meraih masa depan yang lebih cerah dan dapat berkontribusi dalam membangun negeri dengan dapat mengakses pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi. Sebelumnya, Program Bidikmisi juga telah membangun harapan bagi mahasiswa penerim program untuk meraih cita-citanya, mensejahterakan keluarganya dan ikut serta berkontribusi untuk negara. (Rohmah, 2015)

Kesimpulan

Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) di Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan telah berjalan dengan baik. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) telah mewujudkan banyak keinginan ³³ anak-anak Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat mengakses pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) memiliki tujuan luhur untuk dapat memutus rantai kemiskinan lewat kemudahan akses ³⁶ Pendidikan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga harapannya mereka sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) selepasnya menempuh pendidikan dapat mengangkat taraf ekonomi keluarganya.

Praktik di lapangan, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah) masih mengalami kendala seperti dalam hal komunikasi dan sumberdaya. Namun kendala yang muncul pada proses implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) di Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan dapat direspon dengan cepat oleh pihak Universitas sehingga kendala tersebut tidak mengganggu

pelaksanaan. Struktur birokrasi yang hirarki membuat proses pelaporan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dapat berdampak pada proses pencairan dana.

Saran

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita akan semakin kompleks. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) diharapkan dapat mencetak generasi unggul yang dapat ikut berkontribusi membangun negeri dan memutus rantai kemiskinan. Maka sebaiknya mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah diberi pelatihan-pelatihan yang bersifat memberdayakan. Minat mereka yang ingin melanjutkan Pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi sangat tinggi namun tidak semua bisa ditetapkan sebagai penerima karena keterbatasan kuota yang diberikan pada Perguruan Tinggi Swasta, sehingga ke depannya diharapkan kuota penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) dapat ditambahkan sehingga akses Pendidikan tinggi dapat merata untuk dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

Rekomendasi

Melihat fakta yang terjadi di lapangan bahwa sistem pelaporan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) masih belum tersistem dan masih adanya peserta yang kurang patuh dengan ketentuan waktu pelaporan yang dapat berdampak pada proses pencairan dana peserta. Hal ini membuat peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Pelaporan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) sebaiknya dilakukan secara tersistem dan terintegrasi dengan rekening peserta. Masing-masing peserta KIP-Kuliah memiliki akun pada sistem tersebut sehingga peserta dapat melaporkan berkas-berkas yang diminta ke akun mereka. Konsekuensinya adalah peserta yang terlambat melakukan pelaporan di akunnya maka akan terlambat juga pencairan dananya tanpa menghambat proses pencairan dana peserta yang lain.
- Pihak Universitas penyelenggara juga tetap melakukan kegiatan administrasi dalam proses pelaporan dan pencairan pada sistem tersebut, seperti

melampirkan Surat Keputusan Penetapan peserta.

- Memaksimalkan peran Teman KIP untuk melakukan evaluasi secara berkala guna memantau pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- Dengan ditemukannya calon peserta yang layak mendapat Program KIP-Kuliah tapi tidak masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka perlu adanya update data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2020). Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi 2018-2020. In *Https://Www.Bps.Go.Id*.
<https://www.bps.go.id/indicator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html>

Fauzi, A., & Samsuruhuda, H. (2019). Efektivitas Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri

Surabaya. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 19(3).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). Kartu Indonesia Pintar. *Indonesiapintar.Kemdikbud,Go,Id*.
<https://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/>

Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2020). *jdih.kemdikbud.go.id*.

Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.

Rohmah, E. N. (2015). Persepsi Mahasiswa Bidikmisi Universitas Diponegoro Terhadap Harapan Masa Depan. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 181-190.

Roziqin, A., & Yusuf, I. M. (2020). Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 110. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.110-122.2019>

Statistik, B. P. (2021). STATISTIK Profil Kemiskinan di Indonesia. *Profil*

Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

Kemiskinan Di Indonesia Maret,
07(56), 1-12.

Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan*
Publik.

Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jateng.tribunnews.com Internet Source	1%
2	thecolumnist.id Internet Source	1%
3	digilib.unhas.ac.id Internet Source	1%
4	www.kalderanews.com Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	<1%
6	www.scribd.com Internet Source	<1%
7	jurmafis.untan.ac.id Internet Source	<1%
8	www.tipssehatcantik.com Internet Source	<1%
9	jurnal.balitbang.sumutprov.go.id Internet Source	<1%

10

kabarbanten.pikiran-rakyat.com

Internet Source

<1 %

11

www.kerjapns.com

Internet Source

<1 %

12

Rizka Ayu wulandari Rizka. "STRATEGI PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR DAN ORIENTASI MASA DEPAN (SISWA MIA MAN 02 OKUS DI DESA SUGIH WARAS)", ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2022

Publication

<1 %

13

Rusi Rusmiati Aliyyah, Ahmad Gawdy Prananosa, Ismail Ismail, Endang Sri Budi Herawati, Iman Subasman. "Apakah Produk Beasiswa Bidikmisi dapat Memutus Mata Rantai Kemiskinan di Indonesia?", Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT), 2021

Publication

<1 %

14

Submitted to Universitas Negeri Padang

Student Paper

<1 %

15

docobook.com

Internet Source

<1 %

16

conference.unika.ac.id

Internet Source

<1 %

17

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

18

pmb.uisi.ac.id

Internet Source

<1 %

19

Arief Yuswanto Nugroho, Fatichatur Rachmaniyah. "FENOMENA PERKEMBANGAN CROWDFUNDING DI INDONESIA", Ekonika : Jurnal ekonomi universitas kadiri, 2019

Publication

<1 %

20

repository.umy.ac.id

Internet Source

<1 %

21

vavaavav.blogspot.com

Internet Source

<1 %

22

Putri Mutiara Rakista. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2021

Publication

<1 %

23

www.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

24

unihaz.ac.id

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

26

doczz.net

Internet Source

<1 %

27	id.unionpedia.org Internet Source	<1 %
28	jurnal.unitri.ac.id Internet Source	<1 %
29	surabaya.liputan6.com Internet Source	<1 %
30	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
31	journal.umy.ac.id Internet Source	<1 %
32	jurnal.fisip.untad.ac.id Internet Source	<1 %
33	kampusgw.com Internet Source	<1 %
34	La Ode Sumarlin, Nurhasni Nurhasni, Nur Ernita. "Monitoring and Evaluation of Student and Education Elements for Chemistry Undergraduate Program Based on National Accreditation (Monitoring dan Evaluasi Unsur Mahasiswa dan Pendidikan Program Studi Kimia Berbasis Akreditasi Nasional)", Shautut Tarbiyah, 2022 Publication	<1 %
35	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %

36	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
37	indonesiainside.id Internet Source	<1 %
38	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
39	pilihjurusan.com Internet Source	<1 %
40	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1 %
41	soechi.com Internet Source	<1 %
42	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
43	Fransiskus Seda, Maria Dominika Niron. "WUAT WA'I: MODEL GOTONG-ROYONG MASYARAKAT MANGGARAI DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2022 Publication	<1 %
44	core.ac.uk Internet Source	<1 %
45	kumparan.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19
